

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 5, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Pemerintah Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Pongok belum maksimal. Hal ini dikarenakan kelima indikator yang digunakan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Desa Pongok tidak ada yang tercapai. Kelima indikator tersebut yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Dari kelima indikator tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Produktivitas

Pada indikator produktivitas masih ada kendala di kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdesaan. Kualitas sarana dan prasarana perdesaan seperti jalan desa baru lama dibangun sudah mengalami kerusakan hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya kurang pengawasan dari BDP dan masyarakat. Kemudian kuantitasnya juga belum optimal masih ada pembangunan dari program kerja di bidang pelaksanaan pembangunan belum terealisasi seperti, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah.

2. Kualitas Layanan

Jika dilihat dari indikator kualitas layanan yang berkaitan dengan informasi dari pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan masih belum optimal. Informasi yang diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat tidak lengkap sehingga masyarakat merasa kurang puas. Informasi sebelum pelaksanaan hanya berupa infografik APBDesa yang dipasang di *website* desa. Pada saat berlangsungnya kegiatan pembangunan hanya di informasikan melalui papan informasi. Kemudian Pemerintah Desa tidak menginformasikannya kepada masyarakat kegiatan pembangunan apa saja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.

3. Responsivitas

Pemerintah Desa Pongok dalam menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat masih rendah karena masih ada kegiatan pembangunan dari program kerja yang benar-benar dibutuhkan masyarakat belum teralisasi, seperti pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Kemudian masih ada program pada bidang pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa Pongok, seperti pembangunan gedung serbaguna. Keterlibatan masyarakat desa juga masih rendah karena tidak diadakannya musyawarah dusun sebelum kegiatan musrembangdes berlangsung.

4. Responsibilitas

Jika dilihat dari indikator responsibilitas masih melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Desa juga tidak melibatkan BPD pada dalam perubahan APBDesa. Selain itu tidak adanya informasi tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kesesuaian realisasi untuk kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan kebijakan yang dibuat belum baik, karena masih ada program yang ada di RPJM Desa yang belum terealisasi seperti program penanganan dan pengelolaan persampahan, dan juga program pengembangan lingkungan sehat.

5. Akuntabilitas

Kemudian hasil dari indikator akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada semua bidang pembangunan tidak terkecuali di bidang pelaksanaan pembangunan masih belum optimal. Tidak ada informasi yang utuh tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan. Laporan kinerja pemerintahan desa kepada masyarakat seperti dokumen laporan LPPD tidak di informasikan kepada masyarakat desa.

6.2 Saran

Ada beberapa saran yang bisa diperhatikan dan bisa menjadi salah satu penyelesaian masalah yang dihadapi, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan BPD perlu ditingkatkan agar kegiatan pelaksanaan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya.
2. Perlu adanya komitmen kuat dari Pemerintah Desa dalam menjalankan kebijakan dan program yang ada di RPJM Desa.
3. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Pemerintah Desa sebaiknya menginformasikan dan mensosialisasikan rencana kegiatan pembangunan beserta dokumen pendukungnya seperti RKP Desa dan APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat.
4. Seluruh kegiatan pembangunan yang ada di desa perlu di informasikan di *website* desa agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan pembangunan desa.
5. Perlunya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pembangunan desa.

